



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI IX DPR RI**

| | |
|------------------|---|
| Tahun Sidang | : 2016-2017 |
| Masa Persidangan | : III |
| Rapat ke | : 23 (Dua Puluh Tiga) |
| Jenis Rapat | : Rapat Dengar Pendapat |
| Dengan | : Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari/tanggal | : Kamis, 9 Februari 2017 |
| Pukul | : 10.00 WIB – selesai |
| Acara | : 1. Penjelasan Kepala BNP2TKI terkait masalah-masalah yang dihadapi seperti : a. Penjelasan mengenai perlindungan ABK di kapal asing pasca ratifikasi <i>MLC</i> ; b. Permasalahan perpanjangan kontrak TKI melalui PPTKIS di luar negeri, c. Penjelasan mengenai target pada tahun 2017 tentang penghapusan TKI kerja borongan (TKI PRT yang mengerjakan semua pekerjaan), d. Penjelasan mengenai TKI asal Ponorogo yang dianiaya majikan di Singapura. 2. Penjelasan Kepala BNP2TKI mengenai tindak lanjut penanganan masalah TKI yang tersandung hukum di luar negeri. |
| Ketua Rapat | : Dede Yusuf M.E, S.T.,M.I.Pol/ Ketua Komisi IX DPR RI |
| Sekretaris Rapat | : Minarni, S.H./ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat |
| Hadir | : A. 17 orang dari 50 orang Anggota Komisi IX DPR RI; 1 orang anggota izin; B. Kepala BNP2TKI beserta jajaran. |

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala BNP2TKI dibuka pukul 10.30 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 251 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kepala BNP2TKI untuk menindak tegas pihak-pihak yang memberangkatkan TKI secara *non procedural* termasuk PPTKIS, sebagai bentuk perlindungan yang diberikan Negara kepada TKI
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kepala BNP2TKI untuk memonitor perpanjangan kontrak kerja TKI yang dilakukan oleh agensi dan mandiri di luar negeri.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kepala BNP2TKI untuk bekerjasama dengan Perwakilan RI di seluruh Negara Penempatan TKI guna mencegah TKI *non procedural* dan juga meningkatkan sosialisasi pencegahan TKI *non procedural* di dalam Negeri
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kepala BNP2TKI untuk melakukan inisiasi penyelesaian permasalahan tenaga kerja ABK, Nelayan dan Pelaut yang berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
5. Komisi IX DPR mendesak BNP2TKI untuk berperan aktif dalam menindaklanjuti kebijakan pemutihan yang diprogramkan Pemerintah Malaysia dan Negara-negara lainnya.
6. Komisi IX DPR mendesak BNP2TKI untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam menyelesaikan pembahasan RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) sebelum pembahasan bersama Panja Komisi IX DPR RI.

Rapat diakhiri pukul 12.55 WIB

Ketua Rapat/
Ketua Komisi IX DPR RI,



DEDE YUSUF M.E.S.T., M.I.Pol

A-415